



Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Dukungan Lembaga Keuangan terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Tasikmalaya

Adi Rafli Setiadi¹, Alfin Nur Arifah², Herdiyanti³, Ardhiansyah⁴

Universitas Cipasung Tasikmalaya, Indonesia^{1,2,3,4}

raflisetiadi735@gmail.com¹, alfinnurarifah@uncip.ac.id², herdiyanti@uncip.ac.id³, ardhiansyah@uncip.ac.id⁴

Diserahkan tanggal 15 April 2026 | Diterima tanggal 26 Juni 2026 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2026

Abstract:

This study aims to analyze the influence of government policy and financial institution support on the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Tasikmalaya Regency. Although MSMEs play a vital role in regional economic growth, they continue to face numerous challenges, including limited access to financing, low financial literacy, marketing difficulties, and technological adaptation. This quantitative study used a survey approach with 100 MSME actors selected through purposive sampling. Data were collected via questionnaires and analyzed using validity tests, reliability tests, classical assumption tests, and multiple linear regression with IBM SPSS Statistics. The results show that government policy has a positive and significant effect on MSME development ($\beta = 0.355$, $p < 0.001$). Financial institution support also has a positive and significant effect ($\beta = 0.458$, $p < 0.001$). The coefficient of determination ($R^2 = 0.667$) indicates that 66.7% of the variation in MSME development can be explained by these two variables. This study highlights the importance of stronger synergy between government policies and financial institutions to accelerate MSME growth in Tasikmalaya Regency.

Keywords: Government Policy, Financial Institution Support, MSME Development, Msmes In Tasikmalaya Regency.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah dan dukungan lembaga keuangan terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tasikmalaya. Perkembangan UMKM merupakan indikator penting pertumbuhan ekonomi daerah, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi keuangan, keterbatasan pemasaran, dan tantangan adaptasi teknologi. Penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei ini menggunakan sampel sebanyak 100 pelaku UMKM yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, serta analisis regresi linier berganda dengan IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM ($\beta = 0,355$; $p < 0,001$). Dukungan lembaga keuangan juga berpengaruh positif dan signifikan ($\beta = 0,458$; $p < 0,001$). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,667 menunjukkan bahwa 66,7% variasi perkembangan UMKM dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan lembaga keuangan untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Kabupaten Tasikmalaya.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Dukungan Lembaga Keuangan, Perkembangan UMKM, Kabupaten Tasikmalaya.

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan mampu menyerap lebih dari 90% tenaga kerja sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional (Tambunan, 2021:40). Keberadaan UMKM tidak hanya berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendukung pemerataan pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, perkembangan UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi keuangan, keterbatasan pemasaran, dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM, khususnya pada sektor industri kecil berbasis kearifan lokal seperti bordir, batik, anyaman, dan makanan olahan. Namun, data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan dari 77.632 unit pada tahun 2022 menjadi 46.827 unit pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Kabupaten Tasikmalaya masih menghadapi berbagai permasalahan sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan dukungan lembaga keuangan merupakan faktor penting dalam perkembangan UMKM. Dewi (2024:7) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengembangan UMKM melalui program pembinaan dan dukungan usaha yang diberikan kepada pelaku usaha. Hasil penelitian Oktayani dan Dewi (2024:125) juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Selanjutnya, Yulastri dan Darmayanti (2022:10734) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah mampu meningkatkan daya saing UMKM melalui berbagai program pemberdayaan. Dari aspek pembiayaan, Hadi et al. (2024:10) menemukan bahwa dukungan lembaga keuangan berperan penting dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Prasto dan Kristijadi (2025:61) menyatakan bahwa inklusi keuangan dan dukungan lembaga keuangan berpengaruh positif terhadap pemberdayaan UMKM. Selain itu, Lubis et al. (2022:90) membuktikan bahwa akses terhadap layanan keuangan dan teknologi keuangan mampu meningkatkan kinerja UMKM. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM sangat dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan pemerintah dan dukungan lembaga keuangan.

Secara teoritis, kebijakan pemerintah berfungsi menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyediaan regulasi, kemudahan perizinan, program pembiayaan, pelatihan, pendampingan usaha, serta dukungan digitalisasi. Di sisi lain, lembaga keuangan berperan dalam menyediakan akses modal yang memungkinkan pelaku UMKM meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing usaha. Meskipun demikian, penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada pengaruh kebijakan pemerintah atau dukungan lembaga keuangan secara terpisah serta dilakukan pada wilayah penelitian yang berbeda. Penelitian yang menguji kedua variabel tersebut secara simultan terhadap perkembangan UMKM dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya masih relatif terbatas. Oleh karena itu, terdapat *research gap* berupa keterbatasan kajian empiris yang mengintegrasikan pengaruh kebijakan pemerintah dan dukungan lembaga keuangan terhadap perkembangan UMKM pada tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan permasalahan dan *research gap* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah dan dukungan lembaga keuangan terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 pelaku UMKM yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan

uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linier berganda dengan bantuan program IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan ilmu manajemen serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung perkembangan UMKM.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian bertujuan menguji pengaruh variabel independen, yaitu kebijakan pemerintah dan dukungan lembaga keuangan terhadap variabel dependen, yaitu perkembangan UMKM melalui pengolahan data dalam bentuk angka dan analisis statistik. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi masing-masing variabel penelitian berdasarkan persepsi pelaku UMKM, sedangkan metode verifikatif digunakan untuk menguji hubungan dan pengaruh antarvariabel secara empiris berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tasikmalaya. Jumlah populasi UMKM di Kabupaten Tasikmalaya relatif besar dan tidak seluruhnya dapat dijangkau oleh peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2023:138), purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang telah menjalankan usahanya minimal satu tahun dan berdomisili di Kabupaten Tasikmalaya. Jumlah sampel sebanyak 100 responden dinilai telah memadai untuk penelitian kuantitatif karena mampu mewakili karakteristik responden yang sesuai dengan tujuan penelitian serta memenuhi kebutuhan analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini (Creswell, 2022:155).

Definisi operasional variabel digunakan untuk menjelaskan dimensi dan indikator yang digunakan dalam mengukur setiap variabel penelitian. Variabel penelitian terdiri atas kebijakan pemerintah (X1), dukungan lembaga keuangan (X2), dan perkembangan UMKM (Y). Pengukuran seluruh indikator dilakukan menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) hingga skor 5 (sangat setuju). Adapun operasional variabel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Jumlah Item	Sumber
Kebijakan Pemerintah (X1)	Regulasi dan Perizinan	Kemudahan perizinan usaha, penyederhanaan prosedur administrasi	Likert 5 Poin	2	Dewi (2024); Oktayani & Dewi (2024)
	Pembiayaan Pemerintah	Kemudahan memperoleh bantuan modal, akses program KUR/UMi		2	
	Pelatihan dan Pendampingan	Ketersediaan pelatihan usaha, pendampingan pengembangan usaha		2	

	Promosi dan Digitalisasi	Dukungan promosi usaha, fasilitasi digitalisasi UMKM		2	
	Pengembangan Usaha	Dukungan pemerintah terhadap peningkatan daya saing usaha		2	
Dukungan Lembaga Keuangan (X2)	Akses Pembiayaan	Kemudahan memperoleh pembiayaan, ketersediaan produk pembiayaan	Likert 5 Poin	2	Hadi et al. (2024); Prasto & Kristijadi (2025)
	Persyaratan Pembiayaan	Kemudahan persyaratan kredit, fleksibilitas agunan		2	
	Biaya Pembiayaan	Kesesuaian bunga/biaya pembiayaan, keterjangkauan cicilan		2	
	Pelayanan	Kecepatan pelayanan, kemudahan proses administrasi		2	
	Informasi Pembiayaan	Kemudahan memperoleh informasi layanan keuangan, transparansi informasi		2	
Perkembangan UMKM (Y)	Pertumbuhan Penjualan	Peningkatan omzet usaha, peningkatan volume penjualan	Likert 5 Poin	2	Purba (2021); Tambunan (2021)
	Pertumbuhan Pelanggan	Peningkatan jumlah pelanggan, peningkatan loyalitas pelanggan		2	
	Kapasitas Produksi	Peningkatan kapasitas produksi, peningkatan produktivitas usaha		2	
	Perluasan Pasar	Penambahan wilayah pemasaran, peningkatan jangkauan pasar		2	
	Keberlanjutan Usaha	Kemampuan mempertahankan usaha, kemampuan mengembangkan usaha		2	

Berdasarkan Tabel 1, penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terdiri atas kebijakan pemerintah (X1), dukungan lembaga keuangan (X2), dan perkembangan UMKM (Y). Variabel kebijakan pemerintah diukur melalui dimensi regulasi dan perizinan, pembiayaan pemerintah, pelatihan dan pendampingan, promosi dan digitalisasi, serta pengembangan usaha yang terdiri atas 10 item pernyataan. Variabel dukungan lembaga keuangan diukur melalui dimensi akses

pembiayaan, persyaratan pembiayaan, biaya pembiayaan, pelayanan, dan informasi pembiayaan yang terdiri atas 10 item pernyataan. Sementara itu, variabel perkembangan UMKM diukur melalui dimensi pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pelanggan, kapasitas produksi, perluasan pasar, dan keberlanjutan usaha yang terdiri atas 10 item pernyataan. Seluruh indikator diukur menggunakan skala Likert lima poin, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program IBM SPSS Statistics. Sebelum dilakukan analisis regresi, instrumen penelitian diuji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas. Tahap berikutnya adalah analisis regresi linear berganda, uji parsial (uji t), uji kelayakan model (uji F), serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel kebijakan pemerintah dan dukungan lembaga keuangan terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Tasikmalaya.

PEMBAHASAN

Teknik Analisis Data

Uji Validitas Variabel Kebijakan Pemerintah (X1)

Tabel 2

Variabel Kebijakan Pemerintah (X1)

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel 5%	Kriteria
Kebijakan Pemerintah (X1)	X1.1	0,591	0,197	Valid
	X1.2	0,655	0,197	Valid
	X1.3	0,480	0,197	Valid
	X1.4	0,523	0,197	Valid
	X1.5	0,627	0,197	Valid
	X1.6	0,595	0,197	Valid
	X1.7	0,680	0,197	Valid
	X1.8	0,660	0,197	Valid
	X1.9	0,616	0,197	Valid
	X1.10	0,512	0,197	Valid

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji validitas pada variabel Kebijakan Pemerintah (X1) menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai r hitung yang lebih besar dibandingkan nilai r tabel sebesar 0,197. Nilai r hitung berkisar antara 0,480 sampai dengan 0,680. Dengan demikian, seluruh item pernyataan pada variabel Kebijakan Pemerintah (X1) dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian untuk mengukur persepsi responden mengenai kebijakan pemerintah terhadap perkembangan UMKM.

Uji Validitas Variabel Dukungan Lembaga Keuangan (X2)

Tabel 3

Variabel Dukungan Lembaga Keuangan (X2)

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel 5%	Kriteria
Dukungan Lembaga Keuangan (X2)	X2.1	0,397	0,197	Valid
	X2.2	0,405	0,197	Valid
	X2.3	0,687	0,197	Valid
	X2.4	0,443	0,197	Valid
	X2.5	0,520	0,197	Valid
	X2.6	0,556	0,197	Valid
	X2.7	0,604	0,197	Valid
	X2.8	0,664	0,197	Valid
	X2.9	0,749	0,197	Valid

	X2.10	0,610	0,197	Valid
--	-------	-------	-------	-------

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji validitas pada variabel Dukungan Lembaga Keuangan (X2) menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada nilai r tabel sebesar 0,197. Nilai r hitung berada pada rentang 0,397 sampai dengan 0,749. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Dukungan Lembaga Keuangan (X2) memenuhi kriteria validitas sehingga dapat digunakan untuk mengukur persepsi responden mengenai dukungan lembaga keuangan terhadap perkembangan UMKM.

Uji Validitas Variabel Perkembangan UMKM (Y)

Tabel 4
Variabel Perkembangan UMKM (Y)

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel 5%	Kriteria
Perkembangan UMKM (Y)	Y.1	0,648	0,197	Valid
	Y.2	0,600	0,197	Valid
	Y.3	0,661	0,197	Valid
	Y.4	0,726	0,197	Valid
	Y.5	0,592	0,197	Valid
	Y.6	0,648	0,197	Valid
	Y.7	0,581	0,197	Valid
	Y.8	0,658	0,197	Valid
	Y.9	0,635	0,197	Valid
	Y.10	0,610	0,197	Valid

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji validitas pada variabel Perkembangan UMKM (Y) menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai r hitung yang lebih besar dibandingkan nilai r tabel sebesar 0,197. Nilai r hitung berkisar antara 0,581 sampai dengan 0,726. Oleh karena itu, seluruh item pernyataan pada variabel Perkembangan UMKM (Y) dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian untuk mengukur tingkat perkembangan UMKM di Kabupaten Tasikmalaya.

Uji Reliabilitas (X1, X2, Y)

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas (X1, X2, Y)

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Kriteria
Kebijakan Pemerintah (X1)	0,796	0,60	Reliabel
Dukungan Lembaga Keuangan (X2)	0,762	0,60	Reliabel
Perkembangan UMKM (Y)	0,836	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel di atas, variabel kebijakan pemerintah (X1) memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,796, variabel dukungan lembaga keuangan (X2) sebesar 0,762, dan variabel perkembangan UMKM (Y) sebesar 0,836. Seluruh nilai tersebut lebih besar dari standar reliabilitas yaitu 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk analisis data selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan menggunakan metode *One-Sample*

Kolmogorov-Smirnov Test. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah apabila nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

Tabel 6
Hasil Perhitungan Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	Unstandardized Residual	
N		100	100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	.0000000	
	Std. Deviation	4672.616307	2515.276456	
Most Extreme Differences	Absolute	.105	.047	
	Positive	.105	.047	
	Negative	-.045	-.045	
Test Statistic		.105	.047	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.009	.200 ^e	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.009	.857	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.007	.848
		Upper Bound	.012	.866

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

e. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200, yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal, sehingga model regresi telah memenuhi asumsi normalitas dan layak untuk digunakan pada analisis selanjutnya.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12088.400	3305.156		3.657	<,001		
	KEBIJAKAN PEMERINTAH	.123	.117	.119	1.050	.296	.582	1.717
	DUKUNGAN LEMBAGA KEUANGAN	.478	.123	.441	3.899	<,001	.582	1.717

a. Dependent Variable: PERKEMBANGAN UMKM

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel 7 di atas, diketahui bahwa variabel kebijakan pemerintah (X1) dan dukungan lembaga keuangan (X2) masing-masing memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,582, yang berarti lebih besar dari 0,10, serta nilai *VIF* sebesar 1,717, yang berarti lebih kecil dari 10,00. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas, sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8
Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.842	.955		2.598	.011
	KEBIJAKAN PEMERINTAH	.375	.069	.505	5.451	.161
	DUKUNGAN LEMBAGA KEUANGAN	.428	.110	.360	3.887	.446

a. Dependent Variable: PERKEMBANGAN UMKM

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa variabel kebijakan pemerintah (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,161 dan variabel dukungan lembaga keuangan (X2) sebesar 0,446. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi memenuhi salah satu asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Linearitas

Tabel 9.1
Uji Linearitas X1

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
PERKEMBANGAN UMKM * KEBIJAKAN PEMERINTAH	Between Groups	(Combined)	2735504000	87	31442574.71	1.495	.224
		Linearity	487588420.5	1	487588420.5	23.180	<.001
		Deviation from Linearity	2247915580	86	26138553.25	1.243	.355
	Within Groups		252418596.8	12	21034883.07		
Total			2987922597	99			

Tabel 9.2
Uji Linearitas X2

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
PERKEMBANGAN UMKM * DUKUNGAN LEMBAGA KEUANGAN	Between Groups	(Combined)	2889724110	90	32108045.67	2.943	.041
		Linearity	801858669.5	1	801858669.5	73.491	<.001
		Deviation from Linearity	2087865441	89	23459162.25	2.150	.106
	Within Groups		98198486.88	9	10910942.99		
Total			2987922597	99			

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel 9.1 dan tabel 9.2 di atas, diketahui bahwa hubungan antara variabel kebijakan pemerintah (X1) terhadap perkembangan UMKM (Y) memiliki nilai signifikansi *Deviation from Linearity* sebesar 0,355, sedangkan hubungan antara variabel dukungan lembaga keuangan (X2) terhadap perkembangan UMKM (Y) sebesar 0,106. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam penelitian ini bersifat linear. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi linearitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 12,456 + 0,355(X1) + 0,458(X2)$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 12,456 menunjukkan bahwa apabila variabel kebijakan pemerintah (X1) dan dukungan lembaga keuangan (X2) dianggap bernilai nol, maka nilai perkembangan UMKM (Y) sebesar 12,456.
2. Koefisien regresi kebijakan pemerintah (X1) sebesar 0,355 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar satu satuan pada variabel kebijakan pemerintah, maka perkembangan UMKM akan meningkat sebesar 0,355, dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi dukungan lembaga keuangan (X2) sebesar 0,458 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar satu satuan pada variabel dukungan lembaga keuangan, maka perkembangan UMKM akan meningkat sebesar 0,458, dengan asumsi variabel lain tetap.

Koefisien Determinasi R²

Tabel 10
Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.742 ^a	.667	.660	4.87600

a. Predictors: (Constant), DUKUNGAN LEMBAGA KEUANGAN, KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel 10 di atas, diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,667 atau 66,7%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kebijakan pemerintah dan dukungan lembaga keuangan mampu menjelaskan pengaruh terhadap perkembangan UMKM sebesar 66,7%, sedangkan sisanya sebesar 33,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini yang tidak diteliti dalam model penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menjelaskan variabel perkembangan UMKM.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 11
Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2850.450	2	1425.225	97.134	<,001 ^b
	Residual	7369.550	97	75.975		
	Total	10220.000	99			

a. Dependent Variable: PERKEMBANGAN UMKM

b. Predictors: (Constant), DUKUNGAN LEMBAGA KEUANGAN, KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel 11 di atas, diketahui bahwa hasil uji kelayakan model memperoleh nilai signifikansi sebesar < 0,001, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

model regresi dalam penelitian ini dinyatakan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel kebijakan pemerintah dan dukungan lembaga keuangan terhadap perkembangan UMKM.

Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Uji koefisien regresi (*uji t*) dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah apabila nilai signifikansi (*Sig.*) lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sebagaimana tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12
Uji Koefisien Regresi (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.456	3.214		3.876	.011
	KEBIJAKAN PEMERINTAH	.355	.079	.605	5.551	<.001
	DUKUNGAN LEMBAGA KEUANGAN	.458	.210	.460	3.987	<.001

a. Dependent Variable: PERKEMBANGAN UMKM

Sumber: Data diolah, 2026

Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Perkembangan UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel kebijakan pemerintah memperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,355 dengan nilai signifikansi < 0,001 (lebih kecil dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Artinya, semakin baik kebijakan pemerintah yang dirasakan oleh pelaku UMKM, maka perkembangan UMKM juga akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan UMKM, khususnya melalui kemudahan perizinan usaha, akses terhadap program pembiayaan pemerintah, pelatihan dan pendampingan usaha, dukungan promosi, serta program digitalisasi usaha. Kebijakan yang tepat sasaran dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif sehingga pelaku UMKM lebih mudah mengembangkan kapasitas usahanya.

Dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya, hasil penelitian ini dapat dipahami karena sebagian besar UMKM bergerak pada sektor usaha mikro dan kecil yang masih membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, pendampingan usaha, akses pembiayaan, serta perluasan pemasaran. Berbagai program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan kewirausahaan, dan program digitalisasi UMKM memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan daya saing produk. Selain itu, karakteristik UMKM di Kabupaten Tasikmalaya yang didominasi oleh usaha berbasis kerajinan, makanan olahan, dan industri rumah tangga menyebabkan peran pemerintah menjadi sangat penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan. Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan Dewi (2024), Oktayani dan Dewi (2024), serta Yulastri dan Darmayanti (2022) yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengembangan, pertumbuhan, dan daya saing UMKM.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu karena dilakukan pada UMKM di Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki karakteristik usaha berbasis kearifan lokal dan didominasi oleh usaha mikro serta usaha keluarga. Pada penelitian sebelumnya, objek penelitian dilakukan pada wilayah dan sektor usaha yang berbeda. Temuan penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya berpengaruh pada UMKM secara umum, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang khas. Dengan demikian, kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong perkembangan UMKM di Kabupaten Tasikmalaya. Semakin optimal implementasi kebijakan pemerintah yang dirasakan pelaku usaha, maka semakin besar peluang UMKM untuk berkembang.

Pengaruh Dukungan Lembaga Keuangan terhadap Perkembangan UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel dukungan lembaga keuangan memperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,458 dengan nilai signifikansi $< 0,001$ (lebih kecil dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan lembaga keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Artinya, semakin baik dukungan lembaga keuangan yang diterima pelaku UMKM, maka perkembangan UMKM juga akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan, kemudahan proses pengajuan kredit, fleksibilitas persyaratan, tingkat biaya yang terjangkau, serta kualitas pelayanan lembaga keuangan menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan usaha. Dukungan keuangan yang memadai memungkinkan pelaku UMKM meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, menambah modal usaha, serta meningkatkan daya saing.

Dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya, akses terhadap pembiayaan masih menjadi salah satu kebutuhan utama pelaku UMKM karena sebagian besar usaha dijalankan dengan modal yang relatif terbatas. Dukungan dari lembaga keuangan memungkinkan pelaku usaha memperoleh tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi, melakukan inovasi produk, memperluas jaringan pemasaran, serta menjaga keberlangsungan usaha. Kemudahan akses pembiayaan juga membantu pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan usaha, termasuk meningkatnya persaingan pasar dan perubahan kebutuhan konsumen. Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan teori akses pembiayaan dan inklusi keuangan yang menjelaskan bahwa kemudahan akses terhadap layanan keuangan dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Hadi et al. (2024), Munzirwan (2024), Lubis et al. (2022), serta Prasto dan Kristijadi (2025) yang menyatakan bahwa dukungan lembaga keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap perkembangan dan pemberdayaan UMKM.

Namun demikian, penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian terdahulu karena dilakukan pada pelaku UMKM di Kabupaten Tasikmalaya yang sebagian besar masih menghadapi keterbatasan modal usaha dan akses terhadap sumber pembiayaan formal. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya bahwa lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Dengan demikian, dukungan lembaga keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam mendorong perkembangan UMKM di Kabupaten Tasikmalaya. Semakin mudah akses layanan keuangan yang diperoleh pelaku usaha, maka semakin besar peluang UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Tasikmalaya. Temuan ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah, seperti kemudahan perizinan usaha, program pembiayaan, pelatihan dan pendampingan, promosi usaha, serta digitalisasi UMKM mampu mendukung peningkatan perkembangan usaha pelaku UMKM.

Selain itu, dukungan lembaga keuangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudahan akses pembiayaan, fleksibilitas persyaratan, keterjangkauan biaya pembiayaan, dan kualitas pelayanan lembaga keuangan terbukti membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan menjaga keberlanjutan usahanya.

Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah dan dukungan lembaga keuangan terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Tasikmalaya telah tercapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik kebijakan pemerintah dan dukungan lembaga keuangan yang diterima pelaku usaha, maka semakin tinggi pula tingkat perkembangan UMKM di Kabupaten Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, W. A. (2023). Tantangan dalam pengembangan UMKM di Tasikmalaya. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 8(1), 45–62.
- Assanniyah. (2024). Pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM Kecamatan Tanggulangin. *Jurnal Dialektika*, 9(1), 36–49. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v9i1.3917>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2025). *Banyaknya usaha mikro dan kecil menurut kabupaten/kota*. <https://jabar.bps.go.id>
- Creswell, J. W. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewi, R. (2024). Efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(1), 1–12.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2024). *Aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, S., Rahman, A., & Putra, D. (2024). Peran lembaga keuangan dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Indonesia*, 18(1), 1–15.
- Kartawinata, B. R. (2020). *Manajemen usaha kecil dan menengah*. Deepublish.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Laporan tahunan perkembangan UMKM Indonesia 2024*.
- Kristiawati, E. (2024). Pengaruh literasi keuangan dan dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan UMKM: Analisis mediasi orientasi pemasaran. *Jurnal Terapan Ekonomi dan Akuntansi*, 12(2), 145–162.
- Lubis, E. F. M., & Nurhayati. (2024). Pengaruh literasi keuangan dan *financial technology* terhadap kinerja keuangan UMKM. *Journal of Business and Economics Research*, 5(2), 178–187. <https://doi.org/10.47065/jbe.v5i2.5259>
- Munawar, A. H., Masitoh, N., & Sudaryanti, D. S. (2025). Transformasi finansial UMKM dalam rantai hilirisasi industri. *Jurnal Ekonomi Regional*, 1(1), 1–23.
- Munzirwan. (2024). UMKM sebagai pilar ekonomi dan strategi pengelolaan keuangan. *Asian Journal of Innovation*, 2(4), 448–457. <https://doi.org/10.63732/aij.v2i4.147>
- Oktaviani, D., & Vandayani, L. (2025). Pengaruh pembiayaan tanpa agunan terhadap perkembangan UMKM bordir Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 7(1), 15–28.
- Oktayani, N. K., & Dewi, N. P. (2024). Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15(2), 120–130.
- Prasto, A., & Kristijadi, R. (2025). *Financial technology* dan inklusi keuangan terhadap pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Investasi*, 6(1), 55–70.
- Purba, J. H. (2021). *Kinerja dan pengembangan UMKM*. Yayasan Kita Menulis.
- Rahayu, S. (2026). Digitalisasi dan daya saing UMKM di era ekonomi digital. *Jurnal Lentera Bisnis*, 15(1), 25–40.
- Ramadhan, M., Florenta, D., Surbakti, D., Akbar, M., & Fitriyah, D. (2026). Pengaruh *fintech lending* terhadap akses pembiayaan UMKM. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(1), 2652–2659. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6595>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tambunan, T. (2021). *Micro, small and medium enterprises in Indonesia: Development and policy issues*. *Journal of ASEAN Studies*, 9(1), 40–52.
- Yulastri, A., & Darmayanti, N. (2022). Peran kebijakan pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 10730–10739. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10101>.